

**ANALISIS KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN DAERAH ANTAR
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI BARAT SESUDAH PEMEKARAN
DAERAH**

(PERIODE 2010-2015)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
EKONOMI ISLAM
OLEH:**

**HAERANIH
13810130**

PEMBIMBING:

SUNARYATI, S.E., M.Si

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Kondisi perekonomian yang dimiliki oleh setiap daerah khususnya pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat berbeda-beda. Baik dari proporsi pendapatan asli daerah yang dimiliki, potensi unggulan, jumlah penduduk, dan luas wilayah. Hal ini menyebabkan masing-masing daerah memiliki perbedaan dari sisi keuangannya. Oleh karena itu dengan adanya perbedaan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat setelah pemekaran pada tahun 2010-2015. Untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah dalam hal mengelola keuangannya diukur dengan menggunakan rasio keuangan.

Sampel penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Variabel yang digunakan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas belanja rutin dan belanja pembangunan, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah, dan rasio pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan daerah yaitu menggunakan uji beda *One Way Anova* jika data bersifat homogen dan apabila data tidak bersifat homogen menggunakan uji *Kruskall Wallis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian antara kabupaten yang satu dan kabupaten yang lainnya terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat setelah pemekaran daerah tahun 2010-2015. Sedangkan keempat rasio lainnya menunjukkan tidak terdapat perbedaan dalam mengelola keuangannya antara kabupaten yang satu dengan kabupaten lainnya.

Kata Kunci: *Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Conditions economies of every region, especially in the districts/cities in West Sulawesi Barat. Neither of the proportion of local revenues that are owned, excellent potential, population and land area. This causes each region has the distinction of its financial side. Therefore, the presence of these differences, the study aims to determine the difference in financial performance between districts/cities in West Sulawesi Barat after the split in 2010-2015. To see the extent to which the local government in terms of managing its finances measured using financial ratios.

The research sample was conducted in the district/city in West Sulawesi Barat. The variable used is the ratio of the independence, effectiveness ratio, efficiency ratio, the ratio of activity routine expenditure and development expenditure, the growth rate of local revenue and local revenue, and growth ratios routine expenditure and development expenditure. The data used is secondary data obtained from the Budget Realization Report in 2009 until 2016. The analytical tool used to determine differences in the area of financial performance that is using different test One Way Annova if the data is homogeneous and if the data are not homogeneous using Kruskal Wallis test ,

The results of this study indicate that the self-sufficiency ratio between one district and another district there are significant differences in the performance of local government finance district / town in West Sulawesi Barat after the 2010-2015 regional expansion. While four other ratios showed no difference in managing finances between one district with other districts.

Keywords: Local Government, Financial Performance, Independence Ratio, Ratio Effectiveness, Efficiency Ratios, Activity Ratio and Growth Rate.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Haeranih

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Haeranih

NIM : 13810130

Judul Skripsi : **"Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Sesudah Pemekaran Daerah Periode 2010-2015"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

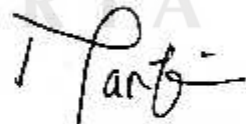
Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunajosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Maret 2017

Pembimbing


Sunaryati, S.E., M.Si

NIP. 1975111 200212 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-1177/Un.02/DEB/PP.05.3/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI BARAT SESUDAH PEMEKARAN DAERAH PERIODE 2010-2015.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAERANIH

Nomor Induk Mahasiswa : 13810130

Telah diujikan pada : Selasa, 14 Maret 2017

Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Sunaryati, S.E., M.Si
NIP. 19751111 200212 2 002

Penguji I

Penguji II

H. Mukhammad Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720913 200312 1 001

Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP. 19631014 199203 1 002

Yogyakarta, 22 Maret 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

DEKAN



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haeranih

NIM : 1381030

Prodi : Ekonomi Syaria'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Sesudah Pemekaran Daerah Periode 2010-2015**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* dan daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 6 Maret 2017

Penyusun



Haeranih

NIM: 13810130

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haeranih
NIM : 13810130
Program studi : Ekonomi Syari'ah
Jenis Karya : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya saya yang berjudul:

"Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Sesudah Pemekaran Daerah Periode 2010-2015".

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada tanggal: 6 Maret 2017

Yang menyatakan



(Haeranih)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	B ’	b	be
	T ’	t	te
	’		es (dengan titik di atas)
	J m	j	je
	’		ha (dengan titik di bawah)
	Kh ’	kh	ka dan ha
	D l	d	de
	l		zet (dengan titik di atas)
	R ’		er
	Z i	r	zet
	S n	z	es
	Sy n	s	es dan ye
	d	SY	es (dengan titik di bawah)
	d		de (dengan titik di bawah)
	’		te (dengan titik di bawah)
	’		zet (dengan titik di bawah)
	‘Ain		koma terbalik di atas
	Gain	’	ge
	F ’		ef
	Q f	g	qi
		f	

هـ	K f	q	ka
	L m	k	el
	M m	l	em
	N n	m	en
	W wu	n	w
	H ’	w	ha
	Hamzah	h	apostrof
Y ’	‘	Ye	
		Y	

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā’ marb ah*

Semua *tā’ marb ah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

الأولياء	ditulis	<i>ikmah</i>
	ditulis	<i>‘illah</i>
	ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---- ---	Fat ah	ditulis	A
---- ---	Kasrah	ditulis	i
---- ---	ammah	ditulis	u

يَهَاب	Fat ah	ditulis	<i>fa'ala</i>
	Kasrah	ditulis	<i>ukira</i>
	ammah	ditulis	<i>ya habu</i>

E. Vokal Panjang

1. fat ah + alif جاهلية	ditulis	Ā
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fat ah + y ' mati	ditulis	ā
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + y ' mati كريم	ditulis	
	ditulis	<i>karīm</i>
4. ammah + w wu mati	ditulis	ū
	ditulis	<i>furū</i>

F. Vokal Rangkap

1. fat ah + y ' mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fat ah + w wu mati	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القياس	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

	ditulis	<i>as-Samā</i>
	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

أهل	Ditulis	<i>awi al-fur</i>
	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

*Saat aku melibatkan Allah SWT dalam semua impianku, aku
percaya tidak ada kata tidak mungkin dalam hidup ini.*

(Yanie Gisselya).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman persembahan

Skripsi ini kupersembahkan kepada Allah SWT, Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kunantikan untuk mendapat syafaat-Nya.

Kepada kedua orang tua serta keluarga ku tercinta yang telah memberikan banyak kasih sayang, doa dan dukungan setiap saat.

Semoga beliau selalu dalam lindungan dan ampunan-Nya. Serta kepada almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tempat ku mendapat banyak ilmu dan pengalaman.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunianya kepada penulis, sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tidak lupa saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya dan mendapatkan syafaatnya di *yaumul kiyamah*. Aamiin.

Penelitian ini merupakan akhir pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat do'a, pengorbanan, serta motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung tugas akhir ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Sunaryati, SE., M.Si., selaku Kaprodi Ekonomi Syariah dan selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan dengan penuh kesabaran kepada penulis.
4. Orang tua tercinta Ibu Ratnawati yang selalu mengiring do'a dan dukungan yang tiada henti.
5. Paman Parakkasi dan Bibi Daha yang selama ini telah membantu dan mendukung pendidikan penulis sampai sekarang, tanpa beliau penulis tidak akan memakai almamater tercinta ini.
6. Teman seperjuangan Aqli, Rufi, Ike, Annisa dan seluruh keluarga Ekonomi Syariah khususnya kelas C angkatan 2013.

7. Teman-teman KKN angkatan 90 kelompok 33 Dea, Sidik, Icha, Ratih, Azizah, Lita, Fajar, Jaka, dan Gevri yang telah memberikan kenangan dan pelajaran hidup kepada penulis.
8. Sahabatku Intan Puspitasari yang selalu membantu, mendukung, dan memotivasi penulis dari awal menginjakkan kaki di kampus ini hingga selesai dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabatku Rufi Yunita Sari yang setiap Saat menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabatku, Iput, Desi dan Acha yang dengan tulusnya membantu penulis memberikan arahan dalam mengolah data.
11. Keluargaku Malik, Reski, Masriani, Tenri, Fia, Nini, Syaifullah dan IADI Jogja yang setiap saat memberikan dukungan.
12. Keluarga besar LP2KIS Jogja yang selalu memberikan asupan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir serta dalam menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diberi balasan melebihi apa yang telahh diberikan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya serta bagi pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Yogyakarta, 6 Maret 2017

Penyusun

Haeranih

NIM:13810130

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Pembahasan	11
1.6 Telaah Pustaka	13
BAB II LANDASAN TEORI	22
2.1 Landasan Teori	22
2.1.1 Teori Otonomi Daerah	22
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	25

2.1.3	Keuangan Daerah	39
2.1.4	Kinerja Keuangan Daerah	40
2.1.4.1	Rasio Kemandirian	41
2.1.4.2	Rasio Efektivitas	44
2.1.4.3	Rasio Efisiensi	45
2.1.4.4	Rasio Aktivitas.....	46
2.1.4.5	Rasio Pertumbuhan.....	47
2.1.5	Keuangan Publik dan Kebijakan Fiskal Islam	51
2.1.6	Pemekaran Daerah	54
2.1.7	Kerangka Teoritis.....	55
2.1.8	Hipotesis	56
BAB III	METODE PENELITIAN	64
3.1	Jenis Dan Sifat Penelitian	64
3.1.1	Teknik Pengumpulan	64
3.1.2	Populasi dan Sampel	65
3.2	Definisi Operasional Variabel	65
3.3	Metode Analisis Data	71
3.3.1	Analisis Uji Beda Kinerja Keuangan	71
3.3.2	Uji Normalitas.....	71
3.3.3	Uji Homogenitas	72
3.3.4	Uji Annova.....	73
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
4.1	Gambaran Umum.....	75
4.1.1	Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat	75
4.1.2	Gambaran Umum Kabupaten Mamuju	76
4.1.3	Gambaran Umum Kabupaten Mamasa	78
4.1.4	Gambaran Umum Kabupaten Mamuju Utara.....	79
4.1.5	Gambaran Umum Kabupaten Polewali Mandar.....	81
4.1.6	Gambaran Umum Kabupaten Majene	82
4.2	Analisis Rasio Keuangan	84
4.2.1	Rasio Kemandirian	84
4.2.2	Rasio Efektivitas	86

4.2.3 Rasio Efisiensi	88
4.2.4 Rasio Aktivitas.....	89
4.2.5 Rasio Pertumbuhan.....	91
4.3 Analisis Uji Beda Kinerja Keuangan	96
4.4 Pembahasan	102
4.4.1 Rasio Kemandirian	102
4.4.2 Rasio Efektivitas	104
4.4.3 Rasio Efisiensi	106
4.4.4 Rasio Aktivitas.....	107
4.4.5 Rasio Pertumbuhan.....	109
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	111
5.1 Kesimpulan	111
5.2 Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	116



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Serta Presentasinya Terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015	6
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 2.1 Jumlah PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat	37
Tabel 3.1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah.....	65
Tabel 3.2 Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	66
Tabel 3.3 Kriteria Pengukuran Efisiensi Keuangan Daerah	66
Tabel 4.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mamuju Atas Harga Berlaku tahun 2015	77
Tabel 4.2 PDRB Mamuju Utara menurut Lapangan Usaha Atas Harga Berlaku dan Struktur Ekonomi Tahun 2015	79
Tabel 4.3 PDRB Polewali Mandar menurut Lapangan Usaha Atas Harga Berlaku dan Struktur Ekonomi Tahun 2015	80
Tabel 4.4 PDRB Majene menurut Lapangan Usaha Atas Harga Berlaku dan Struktur Ekonomi Tahun 2015	82
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010-2015	84
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010-2015	86
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010-2015	87
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010-2015	88
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi barat tahun 2010-2015	90
Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010-2015.....	91

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010-2015.....	93
Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010-2015.....	94
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	95
Tabel 4.14 Hasil Uji <i>Homogenitas</i>	97
Tabel 4.15 Hasil Uji <i>One Way Anova</i>	98
Tabel 4.16 Hasil Uji Statistik <i>Kruskall Wallis</i>	99



DAFTAR GAMBAR

Bagan 1 Kerangka Teoritis	54
---------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu asas dalam suatu pembangunan daerah adalah asas desentralisasi, menurut Undang-undang No 32 tahun 2004 dijelaskan mengenai Otonomi daerah, dimana penyerahan wewenang yang seluas-luasnya kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep dari otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dengan konsep pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, baik urusan pemerintah luar yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2004: 98) kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi kepada daerah mencakup dua langkah strategis yaitu pertama dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa ini seperti ancaman diintegrasikan bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia, kedua diharapkan otonomi daerah dan desentralisasi dapat menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Sejalan dengan konsep tersebut, prinsip dari otonomi daerah yang seluas-luasnya, dijelaskan pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yaitu

prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi yang nyata yaitu suatu prinsip dimana dalam menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasar tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi kekhasan yang dimiliki daerah tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab yaitu penyelenggaraan daerah otonomi harus benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud dari konsep otonomi dimana tujuannya untuk memberdayakan daerah, termasuk dalam hal kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Selain prinsip, tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah salah satunya desentralisasi fiskal yaitu menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah sehingga terwujudnya daerah yang mandiri. Suatu daerah dikatakan mandiri apabila daerah tersebut tidak lagi memperoleh bantuan dana dari pusat baik dari penerimaan pajak perseorangan atau pajak bumi dan bangunan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga untuk mendanai pembangunan daerahnya, dana tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Untuk mengetahui tinggi rendahnya bantuan dana dari pusat dapat dilihat dari realisasi anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Akan tetapi pelaksanaan otonomi daerah sebagai tolak ukur tingkat kemandirian suatu daerah belum berjalan sebagaimana mestinya, dilihat dari

sumber-sumber keuangan di berbagai daerah di Indonesia yang masih mendominasi adalah dana transfer dari pusat.

Besarnya dana transfer dari pusat mengakibatkan terjadinya ketergantungan fiskal. Menurut (Kuncoro, 2014:13-14) faktor-faktor utama penyebab ketergantungan fiskal di Indonesia yaitu:

1. Minimnya peranan perusahaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Tingginya sentralisasi dalam hal perpajakan, dimana pajak-pajak yang menjadi sumber utama daerah atau bisa dikatakan produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat.
3. Pajak daerah yang beraneka ragam tetapi yang bersifat ekonomis hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi daerah.
4. Adanya kekhawatiran apabila suatu daerah memiliki sumber keuangan yang tinggi akan cenderung terjadi disintegrasi dan separatisme.
5. Kelemahan pemerintah pusat dalam pemberian subsidi kepada pemerintah daerah.

Persoalan mengenai kemampuan keuangan daerah merupakan persoalan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan

keuangan daerah seperti sumber daya manusia, manajemen, sarana dan prasarana, pemanfaatan potensi sumber daya alam dan faktor lainnya.

Kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan merupakan hal yang sangat penting. Karena suatu daerah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup. Oleh karena itu keuangan adalah salah satu tolak ukur untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Kuncoro (2007) kemampuan keuangan dalam otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah (Rudiyanto, 2015: 18).

Halim (2004) mengemukakan indikator dalam kinerja keuangan daerah dapat dijadikan evaluasi kerja dan pelaksanaannya. Selain itu kinerja keuangan daerah juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja keuangan daerah disini diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan (Rudiyanto, 2015: 19)

Hasil dari analisis rasio keuangan daerah ini akan menjadi tolak ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah, efektivitas, kontribusi masing-masing sumber dalam pembentukan pendapatan daerah. Selain itu

juga untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan pendapatan dan pengeluaran yang diperoleh selama periode waktu tertentu.

Provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah otonom baru yang melakukan pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk pada 5 Oktober 2004 berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004 yang memiliki 6 kabupaten yaitu Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara, Majene, Mamasa dan Polewali Mandar. Akan tetapi pada penelitian ini penyusun hanya mengambil lima kabupaten yang dijadikan obyek penelitian, karena kabupaten Mamuju Tengah merupakan kabupaten yang baru melakukan pemekaran pada tahun 2013, sehingga belum memenuhi kriteria untuk dilakukan penelitian.

Tujuan provinsi Sulawesi barat melakukan pemekaran tentunya untuk mengelola keuangan daerahnya menjadi lebih baik dan juga dapat menggali potensi-potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerahnya agar meminimalisir ketergantungan terhadap dana dari pusat. Fakta menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana dari pusat masih sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat pada tabel rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada lima kabupaten di provinsi Sulawesi Barat:

Tabel 1.1 Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Serta Presentasinya Terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015

Pemerintah Daerah	Rencana Pendapatan (Juta Rupiah)	Rencana Belanja (Juta Rupiah)	Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) (juta rupiah)	Presentase PAD thd Rencana Pendapatan	Presentase PAD thd Rencana Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Barat	1.240.241.991	1.227.422.384	223.704.907	18,04%	18,22%
Kab.Mamasa	572.602.860	525.465.806	9.688.542	1,7%	1,8%
Kab.Polewali Mandar	808.539.104	804.899.180	31.200.414	3,9%	3,9%
Kab. Majene	596.607.459	588.161.222	21.901.552	3,7%	3,7%
Kab.Mamuju	870.212.247	919.375.320	41.179.733	4,8%	4,5%
Kab.Mamuju Utara	489.660.834	481.604.349	15.390.773	3,1%	3,2%

Sumber: BPS Sulawesi Barat 2015: 364

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas diketahui presentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap presentase rencana pendapatan dari ke lima kabupaten sangat rendah. Hal ini terlihat pada presentase yang rata-rata masih berada di bawah 5%, kabupaten Mamuju sebesar 4,8% yang memiliki presentase tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain, kabupaten Polewali Mandar sebesar 3,9%, kabupaten Majene sebesar 3,7% dan kabupaten Mamuju Utara sebesar 3,1%. Sedangkan kabupaten yang memiliki persentase yang paling rendah yaitu kabupaten Mamasa sebesar 1,7%. Hal ini menunjukkan bahwa peranan PAD sebagai sumber pendapatan utama masih sangat rendah terlihat dari presentase terhadap pendapatan dan belanja daerah.

Peningkatan PAD sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintah, apabila PAD suatu daerah tinggi, maka kemandirian dan ketergantungan fiskal akan berkurang, sehingga bisa dikatakan daerah

tersebut mampu melaksanakan otonomi daerah (Yanuar, 2010:21). Oleh karena itu PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang harus ditingkatkan dengan menggali potensi yang dimiliki daerah dengan tujuan untuk mengurangi beban belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Sehingga tujuan dari pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab dapat tercapai. (Mardiyanto dan Muhammad, 2009: 48)

Permasalahan tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat merupakan masalah bagi daerah otonom baru, termasuk daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki akan menghadapi tingkat kesulitan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga masih membutuhkan bantuan dana dari pusat. Kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang dapat dijadikan sebagai pendapatan asli daerah, akan tetapi semuanya kembali kepada kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan data dan penjelasan di atas, maka peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah pada tahun 2010-2015. Apakah setelah pemekaran terdapat perbedaan dalam pengelolaan kinerja keuangannya, oleh karena itu akan dilakukan perbandingan kinerja keuangan tiap kabupaten untuk mengetahui kabupaten mana dan pada tahun berapa yang telah mengalami peningkatan. Sehingga apabila terjadi penurunan dan pengelolaan keuangan kurang baik, maka dapat menjadi acuan bagi

pemerintah membentuk kebijakan baru untuk memperbaikinya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dengan judul **“Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Sesudah Pemekaran Daerah (Periode 2010-2015)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, diketahui presentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten di provinsi Sulawesi Barat terhadap pendapatan dan belanja daerah masih berada di bawah lima persen, fakta ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan sangat rendah. Hal ini membuktikan perlu dilakukan penelitian untuk melihat kinerja keuangan tiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat sesudah melakukan pemekaran daerah, agar tujuan dari pembentukan daerah otonom baru dapat tercapai.

Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah provinsi, kabupaten atau kota dengan tujuan agar daerah tersebut dapat mandiri dalam mengelola dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah dilihat dari desentralisasi fiskal yaitu kemandirian keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini proporsi bantuan dana dari pusat semakin kecil dan PAD dijadikan sebagai sumber utama dalam mobilisasi pembiayaan penyelenggara pemerintah daerah.

Pada kenyataannya persoalan yang dihadapi oleh daerah otonom yaitu PAD belum menjadi sumber pendapatan utama dalam pembangunan daerah. Daerah dituntut untuk mencari alternatif dalam membiayai pembangunannya tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dari pemerintah pusat. Dengan kondisi ini peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat penting untuk memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sehingga PAD diharapkan tiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan tingkat kemandirian antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah?
2. Apakah ada perbedaan tingkat efektivitas antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah?
3. Apakah ada perbedaan tingkat efisiensi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah?
4. Apakah ada perbedaan tingkat aktivitas belanja rutin antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah?
5. Apakah ada perbedaan tingkat aktivitas belanja pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah?
6. Apakah ada perbedaan tingkat pertumbuhan PAD antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah?

7. Apakah ada perbedaan tingkat pertumbuhan pendapatan daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah?
8. Apakah ada perbedaan tingkat pertumbuhan belanja rutin antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah?
9. Apakah ada perbedaan tingkat pertumbuhan belanja pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat kemandirian antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah.
2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat efektivitas antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah.
3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat efisiensi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah.
4. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat aktivitas belanja rutin antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah.
5. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat aktivitas belanja pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah.

6. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pertumbuhan PAD antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah.
7. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pertumbuhan pendapatan daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah.
8. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pertumbuhan belanja rutin antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah.
9. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pertumbuhan belanja pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca penelitian ini dimaksudkan untuk memberi informasi kepada pembaca mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran.
2. Bagi Pemerintah, penelitian ini memberikan informasi mengenai gambaran secara umum mengenai kebijakan pemerintah terhadap kinerja keuangan daerah Sulawesi Barat, apakah pemerintah saat ini mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dari potensi-potensi yang dimiliki daerah ataukah pemerintah daerah masih bergantung

terhadap bantuan dari pemerintah pusat, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan supaya perekonomian Provinsi Sulawesi Barat kedepannya menjadi lebih baik dan maju.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini sistematika penulisannya terdiri dari lima bab yang memiliki kaitan satu sama lain.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini berisi tentang pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua ini berisi tentang kerangka teori, dalam kerangka teori ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), otonomi daerah, keuangan daerah dan kinerja keuangan, dan rasio keuangan dalam pandangan Islam. Selain itu juga terdapat adanya telaah pustaka, kerangka teoritis dan juga hipotesis penelitian. Dalam telaah pustaka yaitu terdiri dari penelitian-penelitian terdahulu yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini berisi tentang metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, populasi, dan sampel, jenis dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini berisi tentang pembahasan yaitu gambaran umum kabupaten yang menjadi objek penelitian, serta memaparkan hasil analisis perbandingan kinerja keuangan pada kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

BAB V PENUTUP

Bab kelima ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah penulis paparkan serta berupa saran-saran.

10. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai tingkat kemandirian keuangan bukanlah merupakan hal yang baru beberapa penelitian sebelumnya telah diteliti oleh peneliti lain, hanya saja isu yang diangkat serta obyek dalam penelitian terlebih dahulu yang berbeda. Ervina Anwar, Anderson Kumenaung, dan George Kawung (2013) melakukan penelitian mengenai analisis kemandirian fiskal daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara, hasil penelitian ini menunjukkan Kemandirian Fiskal di daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara masih belum dapat dikategorikan Mandiri, pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian, hal ini disebabkan masih rendahnya rasio kemandirian yang dimiliki oleh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Oesi Agustina (2013) melakukan penelitian mengenai analisis kinerja keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi

daerah pada kota Malang. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan alat rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio efektifitas, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Hasil analisisnya menunjukkan rata-rata kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian daerah kota Malang di era otonomi daerah berdasar analisis rasio keuangan menunjukkan hasil yang baik. Terlihat dari tingkat rasio kemandirian keuangan daerah kota Malang bersifat instruktif karena memiliki rata-rata 18,76%, rasio efektivitas presentase rata-ratanya sebesar 105,4% yang berarti pemungutan pendapatan asli daerah cenderung stabil dan efektif, dari hasil prosentase rata-ratanya memberikan biaya intensif untuk memungut PAD secara maksimal, dalam hal rasio aktivitas Pemerintah Kota Malang di era otonomi daerah menunjukkan pemerintah masih memprioritaskan belanja daerahnya untuk belanja rutin dibanding belanja untuk pembangunan, serta rasio pertumbuhan kota Malang menunjukkan bahwa kota Malang mampu mempertahankan kinerjanya dalam mengelola keuangan daerahnya terlihat dari rasio pertumbuhan yang mengalami *trend* positif pada PAD dan pendapatan daerahnya, tetapi di sisi lain juga mengalami *trend* negatif (Belanja daerah).

Endang (2014) melakukan penelitian mengenai analisis kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sebelum dan sesudah pemekaran daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal setelah berlakunya otonomi daerah lebih baik dari pada sebelum di berlakukannya otonomi daerah.

Rendahnya desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Sumatera Selatan hanya berkisar anatar 2,94 sampai 7,34 persen, hal ini disebabkan rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Rendahnya desentralisasi ini tidak hanya karena faktor pengintensifkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, akan tetapi ada faktor lain yakni beberapa sumber PAD beralih ke daerah pemekaran (daerah otonom baru), oleh karena itu salah satu penyebab proporsi PAD terhadap pendapatan daerah rendah.

Adha Pramidaya haji et al (2015) melakukan penelitian mengenai analisis kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah pemekaran wilayah provinsi (studi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan utara), penelitian ini menggunakan 6 sampel informan dari 3 kabupaten/kota. Hasil uji-t indeks peran, pertumbuhan, dan IKK tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pemekaran, sedangkan hasil uji kualitatif menunjukkan penurunan rata-rata indeks peran, pertumbuhan dan IKK. Indeks peran mengalami penurunan karena PAD tidak didesain sebagai sumber utama dalam APBD, indeks pertumbuhan turun karena kabupaten/kota menggunakan deposito untuk meningkatkan PAD sehingga sesudah pemekaran deposito digunakan untuk menutupi defisit anggaran dan penurunan IKK terjadi karena kabupaten/kota cenderung masih bergantung pada dana perimbangan.

Paidi Hidayat et al (2007) melakukan penelitian tentang analisis kinerja keuangan kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara, hasilnya

menunjukkan beberapa hal dilihat dari tiga sisi yaitu (1) sisi pertumbuhan, pengeluaran dan pendapatan di Sumatera Utara secara rata-rata mengalami pertumbuhan pengeluaran lebih besar dibanding pertumbuhan penerimaan, (2) sisi indikator kinerja PAD mengalami pertumbuhan yang positif, dan (3) peta kemampuan keuangan menunjukkan ketidaksiapan masing-masing kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara dan kurangnya keamandirian keuangan dalam berotonomi.

Priyo Hari Adi (2012) mengenai kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi dan relevansinya dengan pertumbuhan ekonomi, hasil penelitian menunjukkan secara umum daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dan PAD, akan tetapi pertumbuhan ini tidak diikuti dengan peningkatan peran (*share*) terhadap belanja dan penelitian ini juga menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmat Subekan mengenai kinerja keuangan dan kesejahteraan rakyat di era desentralisasi fiskal (studi empiris pada kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan 2008-2012) menunjukkan hasil bahwa kemandirian keuangan daerah berada pada pola tata hubungan instruktif, dimana pada pola ini pengarahan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat daripada kemandirian pemerintah daerah sedangkan pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan rakyat menunjukkan arah hubungan yang positif yang berarti semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada alat analisis yang digunakan, jangka waktu dan subjek penelitian yang akan diteliti. Penelitian dan telaah pustaka dari peneliti sebelumnya telah dipetakan sebagai berikut:



Tabel. 1 Hasil Penelitian Sebelumnya dan Telaah Pustaka

No	Penulis	Jenis Referensi	Judul	Variable & alat analisisnya	Ringkasan Hasil
1	Ervina Anwar, Anderson Kumenaung, dan George Kawung	Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Universitas Sam Ratulangi Manado)	Analisis Kemandirian Fiskal Tahun 2010-2012 Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara	Variabel yang digunakan pertumbuhan ekonomi dan Kemandirian Fiskal. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi sederhana.	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah, disebabkan karena rendahnya rasio kemandirian yang dimiliki.
2	Oesi Agustina. A	Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Universitas Brawijaya Malang)	Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)	Variabel yang digunakan adalah pengelolaan keuangan, tingkat kemandirian dan otonomi daerah. Alat analisis yang digunakan menghitung rasio kinerja keuangan daerah	rata-rata kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian daerah kota Malang di era otonomi daerah berdasar analisis rasio keuangan menunjukkan hasil yang baik. Terlihat dari tingkat ratio kemandirian keuangan daerah kota Malang bersifat instruktif karena memiliki rata-rata 18,76%, rasio

					efektifitas presentase rata-ratanya sebesar 105,4% yang berarti pemungutan pendapatan asli daerah cenderung stabil dan efektif, dari hasil prosentase rata-ratanya memberikan biaya intensif untuk memungut PAD secara maksimal.
3	Endang Sri Mulatsih (2014)	Jurnal Ekonomi dan Infromasi Akuntansi (STIE Mulia Drama Pratama)	Analisis kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah	Variabel yang digunakan desentralisasi Fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan pemekaran daerah. Alat analisis yang digunakan uji t sampel berpasangan (<i>parried t-test</i>).	Pemekaran daerah tidak mempengaruhi desentralisasi fiskal per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4	Adha Pramadiya Haji, dkk (2015)	International Journal Of Social And Local Economic Governance (IJLEG)	Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Sebelum Dan Seudah Pemekaran Wilayah Provinsi (Studi Pada Kabuoaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Utara)	Variabel yang digunakan adalah kemandirian keuangan daerah indeks peran, pertumbuhan dan IKK, pendapatan dan belanja daerah. Alat analisis yang digunakan adalah <i>mixed method</i> dan uji-t.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rata-rata pemerintah provinsi, kabupaten/kota Sulawesi mengalami ketergantungan yang cukup kecil, disisi Indeks Dimensi Kemandirian Keuangan, Pulau Sulawesi memiliki kemampuan keuangan daerah yang dapat dikategorikan

					sangat baik, baik, sedang, cukup, kurang dan sangat kurang.
5	Paidi Hidayat dkk (2007)	Jurnal Ekonomi Pembangunan (kajian ekonomi berkembang)	Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara.	Variabel yang digunakan adalah kinerja keuangan, analisis pertumbuhan (<i>growth</i>) dan peran (<i>share</i>). Alat analisis yang digunakan yaitu dengan metode kuadran.	hasilnya menunjukkan beberapa hal dilihat dari tiga sisi yaitu (1) sisi pertumbuhan, pengeluaran dan pendapatan di Sumatera Utara secara rata-rata mengalami pertumbuhan pengeluaran lebih besar dibanding pertumbuhan penerimaan, (2) sisi indikator kinerja PAD mengalami pertumbuhan yang positif, dan (3) peta kemampuan keuangan menunjukkan ketidaksiapan masing-masing kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara dan kurangnya keamdirian keuangan dalam berotonomi.
6	Priyo Hari Adi (2012)	Jurnal penelitian Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga	Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi.	Variabel penelitian yang digunakan PDRB, PAD dan realisasi belanja daerah.	hasil penelitian menunjukkan secara umum daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dan PAD, akan tetapi pertumbuhan ini tidak diikuti dengan peningkatan peran (<i>share</i>) terhadap belanja dan penelitian ini juga menunjukkan masih

					tingginya ketrgantungan terhadap pemerintah pusat.
7	Achmat Subekan dan Azwar	Jurnal Balai Diklat Keuangan Makassar	Kienrja Keuangan Dan Kesejahteraan Rakyat Di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2012).	Variabel independent penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah yang mencakup beberapa parameter sebagai <i>proxy</i> berupa rasio kemandirian (MND), rasio efektifitas (EFT), rasio efisiensi (EFS) dan variabel dependent kesejahteraan soisal yang diukur dengan <i>proxy</i> indeks pembangunan manusia. Alat analisis yang digunakan analisis regresi data panel.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah berada pada pola tata hubungan instruktif, dimana pada pola ini pengarahannya lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat daripada kemandirian pemerintah daerah sedangkan pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan rakyat menunjukkan arah hubungan yang positif yang berarti semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian

Dilihat dari aspek kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah yang signifikan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah, hal ini dilihat dari peningkatan PAD tiap tahunnya pada masing-masing kabupaten.

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PADnya. Hasil uji statistiknya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah yang signifikan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah.

c. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk melihat tingkat efisien kinerja pada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah yang signifikan antar kabupaten/kota

di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah.. Hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat masuk dalam kategori kurang dan tidak efisien.

d. Rasio Aktivitas Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan

Rasio aktivitas pada keuangan daerah digunakan untuk menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya untuk belanja rutin dan pembangunan. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan aktivitas belanja rutin dan belanja pembangunan yang signifikan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan untuk mengukur pertumbuhan yang dicapai dari periode ke periode berikutnya.

1. Rasio pertumbuhan PAD dan pendapatan daerah

menunjukkan perkembangan yang sama yaitu dari tahun ketahun tidak konsisten pada kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio pertumbuhan PAD dan pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah yang signifikan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah.

2. Rasio pertumbuhan Belanja Rutin dan Pembangunan

Rasio pertumbuhan belanja rutin dan belanja pemabangunan masing-masing kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat menggambarkan perkembangan yang fluktuatif cenderung mengalami penurunan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan rasio pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan yang signifikan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat sesudah pemekaran daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang diberikan oleh penyusun untuk pemerintah dan penyusun selanjutnya untuk memperoleh penelitian yang lebih baik lagi.

- 1) Pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat mestinya setelah pemekaran daerah memperhatikan tujuan dibentuknya daerah otonom baru yaitu menjadi daerah yang mandiri dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pusat.
- 2) Pemerintah daerah untuk meningkatkan tingkat kemandirian daerah dengan memperhatikan, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber PAD yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, menggali lagi sektor yang dapat meningkatkan PAD seperti sektor pariwisata karena melihat banyak potensi wisata yang belum dikelola dengan baik, sehingga jika

pemerintah turun tangan mengembangkan sektor pariwisata ini maka dapat menjadi salah satu sektor yang dapat meningkatkan PAD, jadi tidak hanya berfokus pada satu sektor saja.

- 3) Pemerintah dalam penetapan kebijakan anggaran belanja daerah sebaiknya mengacu pada manajemen berbasis kinerja, guna untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Proporsi anggaran untuk belanja rutin khususnya untuk belanja pegawai yang belum terdaftar sebagai PNS atau masih pegawai honorer agar bisa menekan belanja publik terlalu besar.
- 5) Diharapkan agar dalam penyusunan realisasi APBD pada masing-masing kabupaten, pemerintah daerah berpatokan pada rasio-rasio keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan untuk periode selanjutnya.
- 6) Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang kinerja keuangan, diharapkan menambah variabel dalam penelitiannya serta meneliti daerah-daerah otonom baru dan membandingkan dengan daerah yang pengelolaan keuangannya baik sehingga dapat mengetahui secara jelas tentang gambaran kinerja keuangan.

Daftar Pustaka

- Adha, Pramidaya Haji, dkk. “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah Provinsi (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara)”. *International Journal of Social and Local Government (IJLEG)* Vol. 1. 2015.
- Adi, Priyo Hari. “Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi”. *Jurnal. Studi Pembangunan Interdisiplin* Vol. XXI. No. 1. 2012.
- Azhar, Mhd Karya Satya. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah”. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. 2008.
- Azwar dan Subekan Achmat. “Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat di era Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2012)”. *Jurnal Balai Diklat Keuangan Makassar*.
- Bappenas. 2013. “Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah”.
- Batafor Gregorius Gehi. “Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata-Propinsi NTT”. *Tesis*. Universitas Udayana Denpasar. 2011.
- Chaudry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Permata Puri Media.
- Dwijayanti Retno dan Ruserlistyanti. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi SeIndonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volumen 12 Nomor 01*. 2013.
- Endang, Sri Multasih. “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah”. *Jurnal. Ekonomi dan Informasi Akutansi (JENIUS)*. Vol.4 No.1. 2014.
- Fauzi, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari’ah*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana.
- Ferdiyanto, Yanuar. “Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah”. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. 2010

- Halim, Abdul. 2002. *Akutansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. "Akutansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik". Edisi Kedua Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Akutansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2014. *Akutansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2012. *Akutansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2016. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Huda et al. 2012. *Keuangan Publik Islam*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Kuncoro, Mudrajat. 2014. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Lidia, Mariani. "Analisis Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Pemekaran di Padang". *Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Padang*. 2013.
- Muhamad, Rudiyanto. "Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Banten)". *Skripsi*. (Universitas Diponegiri Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2015).
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga
- Paidi Hidayat, dkk. "Ananlisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 2012.
- Suparmoko M. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Santoso, Singgih. 2011. *Mastering SPSS Versi 19*. Jakarta: PT Gramedia.
- Yuwono Sony, dkk. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya*. Malang: Bayumedia Publishing.

Yanuar, Frediyanto. "Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah". *Skripsi*. (Universitas Diponegoro Semarang, 2010)

BPS Provinsi Sulawesi Barat, *Sulawesi Barat Dalam Angka 2016*.

BPS Kabupaten Mamuju, *Mamuju Dalam Angka 2010-2015*.

BPS Kabupaten Mamasa, *Mamasa Dalam Angka 2010-2015*.

BPS Kabupaten Mamuju Utara, *Mamuju Utara Dalam Angka 2010-2015*.

BPS Kabupaten Polewali Mandar, *Polewali Mandar Dalam Angka 2010-2015*

BPS Kabupaten Majene, *Majene Dalam Angka 2010-2015*.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Terjemahan Teks Arab

No	Bab	Hlm	Terjemahan
1.	Bab 2 Bab 4	43 104	Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. At-Taubah: 105)
2.	Bab 2 Bab 4	43 105	Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah: 10).
3.	Bab 2	44	"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (QS. AL-Furqaan: 67)
4.	Bab 2	45	"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raaf: 31).
5.	Bab 2	46	"Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". (QS. Yusuf: 87).
6.	Bab 2 Bab 4	47 108	"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (QS. Al-Furqaan:67).
7.	Bab 2 Bab 4	48 110	"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr: 18)
8.	Bab 2	49	"apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya."(QS. Al-Hasyr: 7).

9	Bab 2	53	“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90).
10.	Bab 4	106	“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al-Isra’:26).



Lampiran 2

Hasil Perhitungan Rasio

Rasio Kemandirian Kab. Mamuju

Tahun	Total PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian
2010	17.276.123.329	555.143.211.821	3%
2011	20.093.095.254	661.456.591.208	3%
2012	36.040.048.199	646.442.437.361	6%
2013	41.179.733.135	800.956.411.255	5%
2014	63.105.872.166	662.452.934.001	10%
2015	74.634.662.000	809.432.919.000	9%

Rasio Efektivitas Kab. Mamuju

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas
2010	27.500.000.000	27.500.000.000	100%
2011	31.763.068.000	31.763.068.000	100%
2012	36.040.048.199	36.040.048.199	100%
2013	36.040.048.199	41.179.733.135	114%
2014	63.105.872.166	55.539.367.583	88%
2015	55.539.367.583	74.634.662.000	134%

Rasio Efisiensi Kab. Mamuju

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
2010	529.828.965.000	572.419.335.000	93%
2011	635.051.460.120	681.558.686.462	93%
2012	530.631.040.590	673.679.479.901	79%
2013	932.820.503.000	842.136.144.390	111%
2014	807.202.286.000	807.202.286.000	100%
2015	922.130.856.000	922.130.856.000	100%

Rasio Aktivitas Kab. Mamuju

Tahun	Total Belanja rutin	Total B. Pembangunan	Total APBD	Rasio Aktivitas B. Rutin	Rasio Aktivitas B. Pemb
2010	424.560.347.908	103.677.627.140	529.828.965.448	80%	20%
2011	478.209.747.534	156.190.042.586	635.051.460.120	75%	25%
2012	527.793.562.435	1.668.930.046.000	530.631.040.590	99%	315%
2013	570.044.356.169	858.190.166.158	1.428.234.522.327	40%	60%
2014	555.345.311.054	159.208.993.492	714.554.304.546	78%	22%
2015	471.066.251.000	450.064.605.000	921.130.856.000	51%	49%

Rasio Pertumbuhan PAD Kab. Mamuju

Tahun	PAD X _n	Realisasi PAD X _n -X _{n-1}	Realisasi PAD X _{n-1}	Rasio Pertum. PAD
2010	27.500.000.000	27.500.000.000	0	0%
2011	20.093.095.254	27.500.000.000	-7.406.904.746	-27%
2012	36.040.048.199	20.093.095.254	15.946.952.945	79%
2013	41.179.733.135	36.040.048.199	5.139.684.936	14%
2014	63.105.872.166	41.179.733.135	21.926.139.031	53%
2015	74.634.662.000	63.105.872.166	11.528.789.834	18%

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kab. Mamuju

Tahun	Realisasi Pendp X _n	Realisasi Pendp X _{n-1}	Realisasi pndp X _n -X _{n-1}	Rasio Pertum. Pendapatan
2010	555.143.211.821	466.975.389.304	88.167.822.517	19%
2011	661.465.591.208	555.143.211.821	106.322.379.387	19%
2012	646.442.437.361	661.465.591.208	-15.023.153.847	-2%
2013	800.956.411.255	646.442.437.361	154.513.973.894	24%
2014	662.452.934.001	800.956.411.255	-138.503.477.254	-17%
2015	809.432.919.000	662.452.934.001	146.979.984.999	22%

Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Kab. Mamuju

Tahun	Realisasi B. Rutin X _n	Realisasi B. Rutin X _{n-1}	Realisasi B.Rutin X _n -X _{n-1}	Rasio Pertum. B.rutin
2010	424.560.347.908	124.068.457.880	300.491.890.028	242%
2011	478.209.747.534	424.560.347.908	53.649.399.626	13%
2012	527.793.562.435	478.209.747.534	49.583.814.901	10%
2013	570.044.356.169	527.793.562.435	42.250.793.734	8%
2014	555.345.311.054	570.044.356.311	-14.699.045.257	-3%
2015	471.066.251.000	555.345.311.054	-84.279.060.054	-15%

Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Kab. Mamuju

Tahun	Realisasi B. Pembgnan X _n	Realisasi B. Pembgnan X _{n-1}	Realisasi B.Pembg X _n -X _{n-1}	Rasio Pertum. B.Pembggn
2010	103.677.627.140	41.455.377.213	62.222.249.927	150%
2011	156.190.042.586	103.677.627.140	52.512.415.446	51%
2012	1.668.930.046.000	156.190.042.586	1.512.740.003.414	969%
2013	858.190.166.158	1.668.930.046.000	-810.739.879.842	-49%
2014	159.208.993.492	858.190.166.158	-698.981.172.666	-81%
2015	450.064.605.000	450.064.605.000	0	0%

Lampiran 2

Rasio Kemandirian Kab. Mamasa

Tahun	Total PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian
2010	6.020.295.475	308.087.671.000	2%
2011	7.682.187.555	368.298.230.041	2%
2012	7.726.698.129	446.563.857.577	2%
2013	9.688.541.647	531.534.725.461	2%
2014	15.447.711.510	517.528.922.850	3%
2015	19.591.653.940	697.196.183.050	3%

Rasio Efektivitas Kab. Mamasa

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas
2010	6.020.295.475	7.254.347.608	83%
2011	7.682.187.555	8.152.037.000	94%
2012	7.726.698.129	8.496.727.077	91%
2013	9.688.541.647	14.496.727.077	67%
2014	15.447.711.510	15.500.227.000	100%
2015	19.591.653.940	19.514.711.340	100%

Rasio Efisiensi Kab. Mamasa

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
2010	339.980.480.562	384.991.579.800	88%
2011	377.646.687.782	429.371.904.449	88%
2012	462.277.732.041	489.459.894.706	94%
2013	525.465.806.063	572.602.860.233	92%
2014	555.443.002.305	587.234.093.727	95%
2015	827.517.250.000	824.528.953.000	100%

Rasio Aktivitas Kab. Mamasa

Tahun	Total Belanja rutin	Total B. Pembangunan	Total APBD	Rasio Aktivitas B. Rutin	Rasio Aktivitas B. Pemb
2010	199.800.540.150	139.317.618.010	338.980.480.562	59%	41%
2011	257.500.096.773	120.246.591.009	377.646.687.782	68%	32%
2012	254.891.244.775	207.386.487.266	462.277.732.041	55%	45%
2013	305.649.311.685	219.816.494.378	525.465.806.063	58%	42%
2014	305.649.312.000	219.815.494.000	525.465.806.000	58%	42%
2015	359.413.865.380	468.103.384.620	827.517.250.000	43%	57%

Rasio Pertumbuhan PAD Kab. Mamasa

Tahun	PAD X _n	Realisasi PAD X _n -X _{n-1}	Realisasi PAD X _{n-1}	Rasio Pertum. PAD
2010	6.020.295.475	7.117.311.520	-1.097.016.045	-15%
2011	7.682.187.555	6.020.295.475	1.661.892.080	28%
2012	7.726.698.129	7.682.187.555	44.510.574	1%
2013	9.688.541.647	7.726.698.129	1.961.843.518	25%
2014	15.447.711.510	9.688.541.647	5.759.169.863	59%
2015	19.591.653.940	15.447.711.510	4.143.942.430	27%

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kab. Mamasa

Tahun	Realisasi Pendp X _n	Realisasi Pendp X _{n-1}	Realisasi pndp X _n -X _{n-1}	Rasio Pertum. Pendapatan
2010	384.991.579.800	315.631.800.700	69.359.779.100	22%
2011	397.356.854.000	384.991.579.800	12.365.274.200	3%
2012	429.371.905.000	397.356.854.000	32.015.051.000	8%
2013	572.703.185.000	429.371.905.000	143.331.280.000	33%
2014	587.234.094.730	572.703.185.000	14.530.909.730	3%
2015	824.528.953.350	587.234.094.730	237.294.858.620	40%

Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Kab. Mamasa

Tahun	Realisasi B. Rutin X _n	Realisasi B. Rutin X _{n-1}	Realisasi B.Rutin X _n -X _{n-1}	Rasio Pertum. B.rutin
2010	199.800.540.150	152.287.620.947	47.512.919.203	31%
2011	257.500.096.773	199.800.540.150	57.699.556.623	29%
2012	254.891.244.775	257.500.096.773	-2.608.851.998	-1%
2013	305.649.311.685	254.891.244.775	50.758.066.910	20%
2014	305.649.312.000	305.649.311.685	315	0%
2015	359.413.865.380	305.649.312.000	53.764.553.380	18%

Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Kab. Mamasa

Tahun	Realisasi B. Pembgnan X _n	Realisasi B. Pembgnan X _{n-1}	Realisasi B.Pembg X _n -X _{n-1}	Rasio Pertum. B.Pembggn
2010	139.317.618.010	181.974.045.951	-42.656.427.941	-23%
2011	120.246.591.009	139.317.618.010	-19.071.027.001	-14%
2012	207.386.487.266	120.246.591.009	87.139.896.257	72%
2013	219.816.494.378	207.386.487.266	12.430.007.112	6%
2014	219.815.494.000	219.816.494.378	-1.000.378	0%
2015	468.103.384.620	219.815.494.000	248.287.890.620	113%

Lampiran 3

Rasio Kemandirian Kab. Mamuju Utara

Tahun	Total PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian
2010	5.659.027.827	285.746.646.001,00	2%
2011	9.091.386.734	378.183.651.247,00	2%
2012	11.782.663.309	415.750.400.038,00	3%
2013	15.390.772.754	474.270.061.135,00	3%
2014	21.232.571.781	521.265.250.407,00	4%
2015	21.897.075.970	672.966.026.220,00	3%

Rasio Efektivitas Kab. Mamuju Utara

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas
2010	5.659.027.827	5.284.598.000	107%
2011	9.091.386.734	6.209.315.000	146%
2012	11.782.663.309	7.052.520.000	167%
2013	15.390.772.754	8.233.088.000	187%
2014	21.232.571.781	14.117.949.000	150%
2015	21.897.075.970	21.232.571.781	103%

Rasio Efisiensi Kab. Mamuju Utara

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
2010	346.125.768.000	346.948.358.000	100%
2011	343.664.920.000	378.183.651.000	91%
2012	494.225.278.000	466.332.954.000	106%
2013	481.604.349.000	489.660.834.000	98%
2014	588.809.798.000	499.978.234.000	118%
2015	700.243.142.000	694.863.102.000	101%

Rasio Aktivitas Kab. Mamuju Utara

Tahun	Total Belanja rutin	Total B. Pembangunan	Total APBD	Rasio Aktivitas B. Rutin	Rasio Aktivitas B. Pemb
2010	144.551.364	201.574.404	346.125.768	42%	58%
2011	243.015.608	94.680.219	337.695.827	72%	28%
2012	271.811.996	104.572.268	376.384.264	72%	28%
2013	171.118.334	310.486.014	481.604.348	36%	64%
2014	374.146.546	184.437.727	558.584.273	67%	33%
2015	423.417.252	276.626.389	700.043.641	60%	40%

Rasio Pertumbuhan PAD Kab. Mamuju Utara

Tahun	PAD X _n	Realisasi PAD X _n -X _{n-1}	Realisasi PAD X _{n-1}	Rasio Pertum. PAD
2010	5.659.027.827	4.645.446.000	1.013.581.827	22%
2011	9.091.386.734	5.659.027.827	3.432.358.907	61%
2012	11.782.663.309	9.091.386.734	2.691.276.575	30%
2013	15.390.772.754	11.782.663.309	3.608.109.445	31%
2014	21.232.571.781	15.390.772.754	5.841.799.027	38%
2015	21.897.075.970	21.232.571.781	664.504.189	3%

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kab. Mamuju Utara

Tahun	Realisasi Pendp X _n	Realisasi Pendp X _{n-1}	Realisasi pndp X _n -X _{n-1}	Rasio Pertum. Pendapatan
2010	349.948.358	527.584.396	-177.636.038	-34%
2011	387.275.038	349.948.358	37.326.680	11%
2012	466.332.954	387.275.038	79.057.916	20%
2013	489.660.834	466.332.954	23.327.880	5%
2014	542.497.820	489.660.834	52.836.986	11%
2015	694.863.102	542.497.820	152.365.282	28%

Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Kab. Mamuju Utara

Tahun	Realisasi B. Rutin X _n	Realisasi B. Rutin X _{n-1}	Realisasi B.Rutin X _n -X _{n-1}	Rasio Pertum. B.rutin
2010	144.551.364	93.568.461	50.982.903	54%
2011	243.015.608	144.551.364	98.464.244	68%
2012	271.811.996	243.015.608	28.796.388	12%
2013	171.118.334	271.811.996	-100.693.662	-37%
2014	374.146.546	171.118.334	203.028.212	119%
2015	423.417.252	374.146.546	49.270.706	13%

Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Kab. Mamuju Utara

Tahun	Realisasi B. Pembgnan X _n	Realisasi B. Pembgnan X _{n-1}	Realisasi B.Pembg X _n -X _{n-1}	Rasio Pertum. B.Pembggn
2010	201.574.404	214.683.126	-13.108.722	-6%
2011	94.680.219	201.574.404	-106.894.185	-53%
2012	104.572.268	94.680.219	9.892.049	10%
2013	310.486.014	104.572.268	205.913.746	197%
2014	184.437.727	310.486.014	-126.048.287	-41%
2015	276.626.389	184.437.727	92.188.662	50%

Lampiran 4

Rasio Kemandirian Kab. Polewali Mandar

Tahun	Total PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian
2010	16.972.723	429.926.625	4%
2011	21.067.129	483.929.729	4%
2012	25.934.953	585.333.151	4%
2013	31.200.414	664.123.003	5%
2014	96.599.288	701.002.121	14%
2015	109.323.926	1.003.568.552	11%

Rasio Efektivitas Kab. Polewali Mandar

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas
2010	16.972.723	32.216.130	53%
2011	21.067.129	28.288.400	74%
2012	25.934.953	32.003.063	81%
2013	31.200.414	30.539.379	102%
2014	96.599.288	145.744.647	66%
2015	109.323.926	96.599.288	113%

Rasio Efisiensi Kab. Polewali Mandar

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
2010	531.084.172.000	446.899.346.000	119%
2011	697.319.756.982	652.189.750.000	107%
2012	708.041.091.000	711.015.500.000	100%
2013	808.988.072.000	808.988.072.000	100%
2014	898.085.824.000	952.871.694.000	94%
2015	1.001.930.426.085	1.081.510.420.174	93%

Rasio Aktivitas Kab. Polewali Mandar

Tahun	Total Belanja rutin	Total B. Pembangunan	Total APBD	Rasio Aktivitas B. Rutin	Rasio Aktivitas B. Pemb
2010	322.768.150	195.223.995	517.992.145	62%	38%
2011	403.836.089	255.036.358	658.871.447	61%	39%
2012	457.611.992	266.988.013	724.600.005	63%	37%
2013	486.647.205	318.251.975	804.899.180	60%	40%
2014	539.093.636	358.686.561	897.780.197	60%	40%
2015	841.733.356	265.133.662	1.106.867.018	76%	24%

Rasio Pertumbuhan PAD Kab. Polewali Mandar

Tahun	PAD Xn	Realisasi PAD Xn-X _{n-1}	Realisasi PAD X _{n-1}	Rasio Pertum. PAD
16.972.723	10.904.509	6.068.214	56%	16.972.723
21.067.129	16.972.723	4.094.406	24%	21.067.129
25.934.953	21.067.129	4.867.824	23%	25.934.953
31.200.414	25.934.953	5.265.461	20%	31.200.414
96.599.288	31.200.414	65.398.874	210%	96.599.288
109.323.926	96.599.288	12.724.638	13%	109.323.926

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kab. Polewali Mandar

Tahun	Realisasi Pendp Xn	Realisasi Pendp Xn-1	Realisasi pndp Xn-X _{n-1}	Rasio Pertum. Pendapatan
2010	446.899.346	451.584.102	-4.684.756	-1%
2011	652.189.750	446.899.346	205.290.404	46%
2012	700.392.910	652.189.750	48.203.160	7%
2013	808.539.104	700.392.910	108.146.194	15%
2014	951.506.827	808.539.104	142.967.723	18%
2015	1.075.660.777	951.506.827	124.153.950	13%

Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Kab. Polewali Mandar

Tahun	Realisasi B. Rutin Xn	Realisasi B. Rutin Xn-1	Realisasi B.Rutin Xn-X _{n-1}	Rasio Pertum. B.rutin
2010	322.768.150	259.138.699	63.629.451	25%
2011	403.836.089	322.768.150	81.067.939	25%
2012	457.611.992	403.836.089	53.775.903	13%
2013	486.647.205	457.611.992	29.035.213	6%
2014	539.093.636	486.647.205	52.446.431	11%
2015	785.245.034	539.093.636	246.151.398	46%

Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Kab. Polewali Mandar

Tahun	Realisasi B. Pembgnan Xn	Realisasi B. Pembgnan Xn-1	Realisasi B.Pembg Xn-X _{n-1}	Rasio Pertum. B.Pembgenn
2010	195.223.995	121.041.897	74.182.098	61%
2011	255.036.358	195.223.995	59.812.363	31%
2012	266.988.013	255.036.358	11.951.655	5%
2013	318.251.975	266.988.013	51.263.962	19%
2014	358.686.561	318.251.975	40.434.586	13%
2015	216.543.680	358.686.561	-142.142.881	-40%

Lampiran 5

Rasio Kemandirian Kab. Majene

Tahun	Total PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian
2010	10.865.270	321.263.725	3%
2011	7.044.224	390.898.749	2%
2012	15.389.348	561.130.935	3%
2013	21.901.552	574.705.907	4%
2014	53.921.491	618.835.857	9%
2015	46.490.002	737.298.337	6%

Rasio Efektivitas Kab. Majene

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas
2010	10.865.270	10.865.270	100%
2011	10.591.823	7.044.224	67%
2012	9.960.929	15.389.348	154%
2013	18.288.536	21.901.552	120%
2014	31.177.900	53.921.491	173%
2015	48.910.510	46.490.002	95%

Rasio Efisiensi Kab. Majene

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
2010	410.051.135.000	332.128.995.000	123%
2011	458.316.718.000	397.942.973.000	115%
2012	579.219.471.000	579.419.471.000	100%
2013	234.397.531.129	596.607.459.000	39%
2014	615.519.195.589	672.757.348.000	91%
2015	724.669.584.389	783.788.339.000	92%

Rasio Aktivitas Kab. Majene

Tahun	Total Belanja rutin	Total B. Pembangunan	Total APBD	Rasio Aktivitas B. Rutin	Rasio Aktivitas B. Pemb
2010	231.694.362	178.356.772	410.051.134	57%	43%
2011	282.728.222	175.588.486	458.316.708	62%	38%
2012	308.096.282	200.437.594	508.533.876	61%	39%
2013	331.206.123	256.955.099	588.161.222	56%	44%
2014	387.926.671	280.471.562	668.398.233	58%	42%
2015	427.817.752	354.688.350	782.506.102	55%	45%

Rasio Pertumbuhan PAD Kab. Majene

Tahun	PAD X _n	Realisasi PAD X _n -X _{n-1}	Realisasi PAD X _{n-1}	Rasio Pertum. PAD
16.972.723	10.865.270	9.506.390	1.358.880	14%
21.067.129	7.044.224	10.865.270	-3.821.046	-35%
25.934.953	15.389.348	7.044.224	8.345.124	118%
31.200.414	21.901.552	15.389.348	6.512.204	42%
96.599.288	53.921.491	21.901.552	32.019.939	146%
109.323.926	46.490.002	53.921.491	-7.431.489	-14%

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kab. Majene

Tahun	Realisasi Pendp X _n	Realisasi Pendp X _{n-1}	Realisasi pndp X _n -X _{n-1}	Rasio Pertum. Pendapatan
2010	332.128.995	122.003.345	210.125.650	172%
2011	397.942.973	332.128.995	65.813.978	20%
2012	576.520.283	397.942.973	178.577.310	45%
2013	596.607.459	576.520.283	20.087.176	3%
2014	672.757.348	596.607.459	76.149.889	13%
2015	783.788.339	672.757.348	111.030.991	17%

Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Kab. Majene

Tahun	Realisasi B. Rutin X _n	Realisasi B. Rutin X _{n-1}	Realisasi B.Rutin X _n -X _{n-1}	Rasio Pertum. B.rutin
2010	231.694.362	200.742.101	30.952.261	15%
2011	282.728.222	231.694.362	51.033.860	22%
2012	308.096.282	282.728.222	25.368.060	9%
2013	331.206.123	308.096.282	23.109.841	8%
2014	387.926.671	331.206.123	56.720.548	17%
2015	427.817.752	387.926.671	39.891.081	10%

Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Kab. Majene

Tahun	Realisasi B. Pembgnan X _n	Realisasi B. Pembgnan X _{n-1}	Realisasi B.Pembg X _n -X _{n-1}	Rasio Pertum. B.Pembggn
2010	178.356.772	144.977.906	33.378.866	23%
2011	175.588.486	178.356.772	-2.768.286	-2%
2012	200.437.594	175.588.486	24.849.108	14%
2013	256.955.099	200.437.594	56.517.505	28%
2014	280.471.562	256.955.099	23.516.463	9%
2015	354.688.350	280.471.562	74.216.788	26%

Lampiran 6

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

Rasio Kemandirian

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		rasio_kemandiria n
N		30
Normal Parameters ^a	Mean	4.3667
	Std. Deviation	2.80988
Most Extreme Differences	Absolute	.285
	Positive	.285
	Negative	-.200
Kolmogorov-Smirnov Z		1.562
Asymp. Sig. (2-tailed)		.015

a. Test distribution is Normal.

Rasio Efisiensi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		rasio_efisiensi
N		30
Normal Parameters ^a	Mean	97.3333
	Std. Deviation	14.87959
Most Extreme Differences	Absolute	.202
	Positive	.169
	Negative	-.202
Kolmogorov-Smirnov Z		1.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.173

a. Test distribution is Normal.

Rasio Efektivitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		rasio_efektivitas
N		30
Normal Parameters ^a	Mean	107.6333
	Std. Deviation	33.37817
Most Extreme Differences	Absolute	.189
	Positive	.189
	Negative	-.075
Kolmogorov-Smirnov Z		1.033
Asymp. Sig. (2-tailed)		.237

a. Test distribution is Normal.

Rasio Aktivitas Belanja Rutin

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		rasio_aktivitas_b elanja_rutin
N		30
Normal Parameters ^a	Mean	61.4667
	Std. Deviation	12.91813
Most Extreme Differences	Absolute	.153
	Positive	.153
	Negative	-.142
Kolmogorov-Smirnov Z		.837
Asymp. Sig. (2-tailed)		.486

a. Test distribution is Normal.

Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		rasio_aktivitas_b elanja_modal
N		30
Normal Parameters ^a	Mean	49.0000
	Std. Deviation	51.38697
Most Extreme Differences	Absolute	.352
	Positive	.352
	Negative	-.286
Kolmogorov-Smirnov Z		1.927
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001

a. Test distribution is Normal.

Rasio Pertumbuhan PAD

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		rasio_pertumbuh an_pad
N		30
Normal Parameters ^a	Mean	35.4667
	Std. Deviation	50.32908
Most Extreme Differences	Absolute	.202
	Positive	.202
	Negative	-.107
Kolmogorov-Smirnov Z		1.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.173

a. Test distribution is Normal.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		rasio_pertumbuhan_pendapatan_daerah
N		30
Normal Parameters ^a	Mean	19.4333
	Std. Deviation	33.20125
Most Extreme Differences	Absolute	.245
	Positive	.245
	Negative	-.193
Kolmogorov-Smirnov Z		1.344
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054

a. Test distribution is Normal.

Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		rasio_pertumbuhan_belanja_rutin
N		30
Normal Parameters ^a	Mean	26.2667
	Std. Deviation	48.87629
Most Extreme Differences	Absolute	.295
	Positive	.295
	Negative	-.208
Kolmogorov-Smirnov Z		1.614
Asymp. Sig. (2-tailed)		.011

a. Test distribution is Normal.

Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		rasio_pertumbuhan_belanja_pembangunan
N		29
Normal Parameters ^a	Mean	52.1379
	Std. Deviation	185.86395
Most Extreme Differences	Absolute	.320
	Positive	.320
	Negative	-.251
Kolmogorov-Smirnov Z		1.721
Asymp. Sig. (2-tailed)		.005

a. Test distribution is Normal.

Lampiran 7

Hasil Uji Homogenitas

Rasio Efisiensi

Test of Homogeneity of Variances

rasio_efisiensi

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.083	4	25	.113

Rasio Efektivitas

Test of Homogeneity of Variances

rasio_efektivitas

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.440	4	25	.073

Rasio Aktivitas Belanja Rutin

Test of Homogeneity of Variances

rasio_efektivitas

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.440	4	25	.073

Rasio Pertumbuhan PAD

Test of Homogeneity of Variances

rasio_pertumbuhan_pad

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.467	4	25	.071

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Test of Homogeneity of Variances

rasio_pertumbuhan_pendapatan_daerah

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.232	4	25	.094

Lampiran 8

Hasil Uji One Way Anova

Rasio Efisiensi

ANOVA

rasio_efisiensi

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	518.333	4	129.583	.549	.702
Within Groups	5902.333	25	236.093		
Total	6420.667	29			

Rasio Efektivitas

ANOVA

rasio_efektivitas

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	14472.467	4	3618.117	5.071	.004
Within Groups	17836.500	25	713.460		
Total	32308.967	29			

Rasio Pertumbuhan PAD

ANOVA

rasio_pertumbuhan_pad

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5892.800	4	1473.200	.545	.704
Within Groups	67564.667	25	2702.587		
Total	73457.467	29			

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

ANOVA

rasio_pertumbuhan_pendapatan_daerah

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5385.533	4	1346.383	1.266	.309
Within Groups	26581.833	25	1063.273		

ANOVA

rasio_pertumbuhan_pendapatan_daerah

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5385.533	4	1346.383	1.266	.309
Within Groups	26581.833	25	1063.273		
Total	31967.367	29			

Lampiran 8

Hasil Uji Kruskal Wallis

Rasio Kemandirian

Test Statistics^{a,b}

	rasio_kemandiria n
Chi-Square	16.304
df	4
Asymp. Sig.	.003

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: factor

Rasio Aktivitas Belanja Rutin

Test Statistics^{a,b}

	rasio_aktivitas_b elanja_rutin
Chi-Square	4.926
df	4
Asymp. Sig.	.295

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: factor

Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan

Test Statistics^{a,b}

	rasio_aktivitas_b elanja_modal
Chi-Square	2.985
df	4
Asymp. Sig.	.560

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: factor

Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin

Test Statistics^{a,b}

	rasio_pertumbuh an_belanja_rutin
Chi-Square	2.718
df	4
Asymp. Sig.	.606

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: factor

Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

Test Statistics^{a,b}

	rasio_pertumbuh an_belanja_pem angunan
Chi-Square	.522
df	4
Asymp. Sig.	.971

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: factor

CURICULUM VITAE



A. BIOGRAFI

Nama : Haeranih
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 03 Juli 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat Rumah : Jl. Pemuda No 4 Pekkabata Sentral, Polewali
Mandar, Sulawesi Barat.
Alamat Domisili : Jl Parem No 105 Sorowajan Baru Yogyakarta
Nomor Telepon : 082346159418
Email : Haeranih75@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2000-2006 : Pendidikan SDN 028 Pekkabata
2006-2009 : Pendidikan SMP Negeri 03 Polewali
2009-2012 : Pendidikan SMA Negeri 1 Polewali
2012 – sekarang : Pendidikan Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta